

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota
Semarang)**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Selin Aghnia Mardatilla

NIM: 31401606552

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2022**

Skripsi

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)

Disusun Oleh :

Selin Aghnia Mardatilla

Nim : 31401606552

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 12 Agustus 2022

Pembimbing



Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., CA

NIK : 211496006

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI,
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Kasus Pada OPD Kota Semarang)

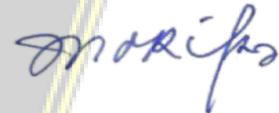
Disusun Oleh :
Selin Aghnia Mardatilla
Nim : 31401606552

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada Tanggal 12 Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji 1



Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., CA

Dr. Hj. Indri Kartika, M.Si, Akt, CA

NIK : 211496006

NIK : 211490002

Penguji 2



Drs. Osmad Mutaher, M.Si

NIK : 210403050

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 12 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih., SE., M.Si

NIK : 211415029

SURAT PERYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selin Aghnia Mardatilla

NIM : 31401606552

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian untuk skripsi dengan judul

**“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (**

STUDI KASUS PADA OPD KOTA SEMARANG)”. Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

Selin Aghnia Mardatilla

NIM : 31401606552

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selin Aghnia Mardatilla

NIM : 31401606552

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

No.HP / Email : 0895393351944 / selinaghnia98@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah saya berupa Skripsi dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA OPD KOTA SEMARANG)”**. dan menyetujuinya menjadi milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-akslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 12 Agustus 2022

Selin Aghnia Mardatilla

NIM : 31401606552

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selin Aghnia Mardatilla

NIM : 31401606552

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

No.HP / Email : 0895393351944 / selinaghnia98@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah saya berupa Skripsi dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA OPD KOTA SEMARANG)”**. dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-akslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan publikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 12 Agustus 2022

Selin Aghnia Mardatilla

NIM : 31401606552

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT atas seluruh karunia beserta rahmat-Nya, maka penulis mampu menuntaskan usulan riset Skripsi dengan judulnya yaitu “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Saat menyusun usulan riset Skripsi ini yaitu guna melakukan pemenuhan bagian syarat menyelesaikan program studi Sarjana (S1) kemudian bisa meraih gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada saat menulis usulan riset. Skripsi pastinya berhubungan dengan bantuan berbagai pihak, maka dari itu penulis berkeinginan memberi ucapan berterima kasih terhadap:

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi.
3. Bapak Dedi Rusdi, SE.,M.Si.,AK.,CA selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan serta memotivasi penulis sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr.Hj. Indri Kartika, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Drs. Osmad Mutaher, M.Si selaku dosen penguji yang selalu sabar, teliti dan memberi pengarahan, motivasi, pengetahuan, maka pra-skripsi ini bisa terwujud.

5. Semua staff karyawan beserta dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang sudah memberi pembekalan mencakup ilmu pengetahuan untuk landasan menyusun skripsi ini.
6. Ibu Munasiroh dan Bapak Muslinan Bambang Priyono selaku orangtua dari penulis yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan selalu memotivasi penulis yang tiada henti yang sangat besar nilainya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melindungi Ibu dan Bapak dalam lindungan-Nya.
7. Ibu Musyarofah dan Bapak Ahmad Yani selaku orang spesial dihati penulis, yang selalu mendoakan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan selalu memotivasi penulis yang tiada henti yang sangat besar nilainya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melindungi Ibu dan Bapak dalam lindungan-Nya.
8. Mbak Zian, Dek Via, Mas Rifki, selaku saudara spesial dari penulis, yang selalu memberikan doa tanpa henti untuk penulis. Terima kasih atas semua perhatian yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT mengabulkan doa – doa dan hajat yang kalian inginkan, Aamiin.
9. Adekku tercinta “Fauzi Aulia Suryatama” yang selalu memberikan do’a, semangat dan motivasi tanpa henti.
10. Keluarga besar dari Ibu Munasiroh dari Kota Cilacap yang sudah mendoakan penulis, memberi motivasi, memberi semangat tanpa henti.

11. Keluarga besar dari Bapak Muslinan dari Kota Kudus yang sudah mendoakan penulis dan memberi semangat tanpa henti.
12. Sahabat-sahabatku yang selalu menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2016.
14. Seluruh pihak yang sudah memberi bantuna untuk menyelesaikan pra-skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Rasa berterima kasih penulis sampaikan untuk segala bantuan yang diberi.

Penulis sadar secara penuh bahwasanya dalam menyusun pra-skripsi masih belum mencapai kesempurnaan dikarenakan hal-hal yang terbatas yang dipunyai penulis. Penulis mengharap seluruh wujud kritik beserta saran yang mengonstruksikan supaya pra-skripsi bisa lebih mencapai kesempurnaannya. Serta penulis mengharapkan pra-skripsi ini mampu memberi manfaat kepada pihak yang membaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)	15
2.2 Variabel – Variabel Penelitian	19
2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	19
2.2.2 Akuntabilitas	20
2.2.3 Transparansi	21
2.2.4 Sistem Pengendalian Intern	22
2.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	24

2.3	Penelitian Terdahulu.....	25
2.4	Pengembangan Hipotesis	37
2.4.1	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	37
2.4.2	Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	39
2.4.3	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40
2.4.4	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42
2.5	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	44
BAB III		45
METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis Penelitian	45
3.2	Populasi dan Sampel	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	49
3.4	Metode Pengumpulan Data	49
3.5	Variabel – Variabel Penelitian	50
3.5.1	Variabel Dependen	50
3.5.2	Variabel Independen	50
3.6	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	50
3.7	Teknik Analisis Data	65
3.7.1	Statistik Deskriptif.....	66
3.7.2	Uji Kualitas Data	66
3.7.3	Uji Validitas Data.....	67
3.7.4	Uji Reliabilitas.....	67
3.7.5	Uji Asumsi Klasik	68
3.7.6	Uji Normalitas	68
3.7.7	Uji Multikolinearitas	69
3.7.8	Analisis Regresi Linear Berganda.....	69
3.7.9	Uji F.....	70

3.7.10 Uji t.....	71
3.7.11 Koefisien Determinasi R-Square (R ²).....	72
BAB IV.....	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	73
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	74
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	76
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	78
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	80
4.2.1 Tanggapan Variabel.....	81
4.3 Analisis Data.....	91
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	91
4.4 Hasil Uji Kualitas Data.....	93
4.4.1 Uji Validitas.....	93
4.4.2 Uji Reabilitas.....	96
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	97
4.5.1 Hasil Uji Normalitas.....	97
4.5.2 Uji Multikolonieritas.....	99
4.6 Hasil Uji Hipotesis.....	100
4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	100
4.6.2 Hasil Uji – t.....	103
4.6.3 Hasil Uji F.....	106
4.6.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	107
4.7 Pembahasan.....	108
4.7.1 Pengaruh Secara Stimultan Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	108
4.7.2 Pengaruh Penerapan Akuntabilitas secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.....	109
4.7.3 Pengaruh Transparansi Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang.....	110

4.7.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang.....	112
4.7.5 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang	113
BAB V	115
PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Implikasi	116
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	117
5.4 Agenda Penelitian Mendatang	118
5.5 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120



DAFTAR TABEL

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	34
Tabel 3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	36
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner	51
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	52
Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan Masa Kerja	54
Tabel 4.5 Tanggapan Akuntabilitas (X1)	56
Tabel 4.6 Tanggapan Transparansi (X2)	57
Tabel 4.7 Tanggapan Sistem Pengendalian Intern (X3)	59
Tabel 4.8 Tanggapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	60
Tabel 4.9 Tanggapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	61
Tabel 4.10 Analisis Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas	67
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolonieritas	71
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	72
Tabel 4.16 Hasil Uji – t	74

Tabel 4.17 Hasil Uji – f 77

Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	52
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	53
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	98
Lampiran 2 : Data Responden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	107
Lampiran 3 : Data Responden Akuntabilitas	109
Lampiran 4 : Data Responden Transparansi	112
Lampiran 5 : Data Responden Sistem Pengendalian Intern	115
Lampiran 6 : Data Responden Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	117
Lampiran 7 : Deskripsi Variabel Penelitian.....	121
Lampiran 8 : Uji Statistik Deskriptiv.....	132
Lampiran 9 : Uji Validitas.....	133
Lampiran 10: Uji Reabilitas.....	142
Lampiran 11: Uji Asumsi Klasik	143
Lampiran 12: Uji Hipotesis.....	143
Lampiran 13: Surat Izin Penelitian	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Reformasi beragam sektor atau bidang yang memiliki perkembangan pada negara Indonesia sudah memberi dinamika pada tatanan perpolitikan, sosial, maupun perekonomian, maka memicu permintaan yang bervariasi oleh rakyat kepada kegiatan mengelola pemerintahan yang baik. Suatu rancangan reformasi untuk menciptakan pengelolaan pemerintahan yang baik yakni dengan menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah susunan bukti pendapatan, penyimpanan dan pengeluaran dalam periode yang sudah di tentukan dan telah dibukukan dari transaksi yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah terkait biaya barang dan jasa yang telah diterima untuk peningkatan keberhasilan daerahnya. Pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk mempermudah mengevaluasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang terbaik untuk peningkatan keberhasilan dalam mengelola daerahnya dari aspek ekonomi, sosial dan politik untuk periode sekarang maupun periode berikutnya. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari beberapa bukti pelaporan finansial organisasi perangkat daerah (OPD), laporan keuangan organisasi perangkat daerah adalah sampel dari pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah yang digunakan sebagai

informasi dalam kerangka tanggung jawab manajemen keuangan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan oleh pemangku daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh hasil evaluasi setiap tahun berupa penilaian (Opini) dari auditor pemerintah yaitu badan pengawas keuangan (BPK). Opini tersebut dapat menggambarkan kualitas baik atau buruk dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa. BPK bisa memberi empat jenis pendapat atau opini, yakni opini tidak wajar (TW), opini wajar tanpa pengecualian (WTP), tidak memberi pendapat (TMP), opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Seperti yang sudah ditetapkan di dalam (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) perihal pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, saat badan pemeriksa keuangan menyampaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada umumnya bermakna laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan oleh entitas pemerintah daerah sudah memenuhi syarat dengan berhubungan, reliabel, serta bisa dipercaya. Manakala hasil penilaian dari BPK memperoleh opini tidak wajar (TW) dan tidak memberi pendapat (TMP) pada umumnya bermakna laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan oleh entitas pemerintah daerah belum memenuhi syarat atau belum menyajikan data secara relevan, andal dan dapat dipercaya sehingga memerlukan perbaikan kembali.

Laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang telah disajikan perlu dikaji kembali, khusus nya pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang, karena dari sejumlah berita yang tercantum di internet, pada kebenarannya laporan

keuangan pemerintah daerah di Kota Semarang ternyata belum memenuhi syarat yang relevan dan andal, misalnya pada laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang tahun anggaran 2017. Sebagaimana naskah yang telah di rangkum sebagai berikut: anggota badan anggaran DPRD kabupaten semarang M. Jauhari Mahmud mengatakan bahwa badan pemeriksa keuangan dari Provinsi Jawa Tengah telah menemukan 9 bukti yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang tahun anggaran 2017 yang tidak relevan antara data dan fakta dilapangan yang telah disusun dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Dimana berdasarkan penjelasannya, 9 bukti tersebut adalah hasil pemeriksaan atas dasar sistem pengendalian intern (SPI) yang tidak memadai dan juga ditemukan 8 bukti lainnya yang masuk dalam kategori tidak patuh dan tidak disiplin terhadap undang – undang. Terlihat ada kelebihan pembayaran yang dilakukan organisasi perangkat daerah Kota Semarang, seperti contoh di Dinas Pendidikan, kebudayaan, Kepemudaan dan olah raga (Disdikbudpora) kabupaten Semarang. Pada dinas tersebut ditemukan fakta ada kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru sebanyak Rp. 90.177.785, kemudian ada kelebihan pembayaran belanja modal yang terjadi di 6 OPD Kabupaten Semarang dengan total kelebihan sebanyak Rp. 230.237.674. Perjanjian kerjasama diantara Dinas Lingkungan Hidup bersama perusahaan daerah air minum (PDAM) kab. semarang terkait memungut iuran atau retribusi sampah terlihat tidak selaras dengan tata tertib yang berlaku, sebagaimana telah ditetapkan di dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010) yang berisi hasil retribusi yang boleh dipungut paling banyak hanya 5%, tetapi pada kebenarannya fakta di lapangan PDAM tersebut meminta retribusi sebesar 10%, serta terdapat pada

besaran denda keterlambatan pembayaran tagihan klaim BPJS dalam RSUD Ambarawa pada tahun 2017 sebanyak Rp. 48.275.612 dan di RSUD Ungaran sebanyak Rp. 139.505.915, selanjutnya pada penataan lelang pengerjaan tanah bekas bengkok juga belum berjalan sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku (<https://jateng.tribunnews.com/2018/07/24/jauhari-sebut-ada-9-temuan-bpk-di-lhp-laporan-keuangan-pemkab-semarang>).

Dalam peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa pelaporan finansial pemerintahan daerah Kota Semarang tahun anggaran 2017 masih banyak temuan penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, serta masih banyak data dan fakta yang tidak sesuai di lapangan, sehingga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja entitas pemerintah daerah Kota Semarang demi menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat menunjang pada perkembangan dan pertumbuhan iklim perekonomian daerah. Berdasarkan (PP No. 71 Tahun 2010) pelaporan finansial yang mempunyai kualitas yaitu pelaporan finansial yang berkarakteristik reliabel, relevan, bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan yang sejenis dan dapat dipahami.

Agar bisa menciptakan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mempunyai kualitas di OPD Kota Semarang, maka organisasi perangkat daerah Kota Semarang perlu memiliki sistem informasi yang andal. Sistem informasi yang andal dapat hadir dengan adanya variabel yang mendukung kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, seperti: akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia.

Variabel pertama yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Fakta yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memberi pengaruh kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah adalah dimana akuntabilitas sendiri bekerja untuk menata dan mengatur pendapatan organisasi perangkat daerah agar dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) dan publik. Dengan adanya akuntabilitas di dalam organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang, maka dapat memperkuat sistem dan lembaga berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku. Akuntabilitas juga berdampak secara langsung pada peningkatan tata kelola keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Riyanti, 2017) dengan hasil akuntabilitas ada pengaruhnya positif kepada kualitas pelaporan finansial pemerintah daerah, bermakna yakni makin bagus akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah, berarti makin bagus juga pertanggungjawaban yang

dilakukan oleh organisasi perangkat daerah menjadi semakin akuntabel sehingga dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu akuntabilitas, juga perlu dipertimbangkan. Hal ini selaras terhadap riset yang dilaksanakan oleh (Simanjorang, 2018) dan (Idward, 2017) yang mengungkapkan yakni akuntabilitas ada pengaruhnya positif serta bersignifikan kepada kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Variabel kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang adalah transparansi. Transparansi adalah salah satu faktor penting yang dibutuhkan di dalam organisasi perangkat daerah Kota Semarang karena untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan terbuka. Fakta yang menunjukkan bahwa transparansi memberi pengaruh kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah yaitu dengan memberikan informasi serta kondisi laporan finansial daerah yang sesungguhnya dengan jelas dan relevan kepada DPR dan publik. Sehingga dengan adanya transparansi di sektor organisasi perangkat daerah Kota Semarang maka setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh organisasi perangkat daerah Kota Semarang dapat di monitor oleh DPR dan publik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Simanjorang, 2018) dengan hasil transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bermakna bahwa semakin transparan organisasi perangkat daerah Kota Semarang dalam mengelola dana anggaran pendapatan belanja

daerah (APBD), maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang semakin meningkat. Sehingga dapat berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi perangkat daerah Kota Semarang. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Riyanti, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh kepada kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah.

Variabel ketiga yang mungkin memberi pengaruh kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah Kota Semarang adalah sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses persatuan antara SDM dengan sistem teknologi informasi yang disusun guna memberi bantuan badan perangkat daerah Kota Semarang dalam meraih tujuan tertentu. Sistem pengendalian intern bekerja dengan cara mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya organisasi perangkat daerah Kota Semarang. Fakta yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam meraih tujuan administrasi pemerintahan, memberikan keandalan informasi perihal laporan keuangan pemerintah daerah, me-manajemen aset sumber daya organisasi perangkat daerah, dan memiliki kepatuhan terhadap peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga tanpa adanya sistem pengendalian intern di organisasi perangkat daerah Kota Semarang, maka organisasi perangkat daerah Kota Semarang akan kesulitan dalam mengukur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan akan berdampak pada kesulitan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2019) dengan hasil sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bermakna bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah Kota Semarang, maka semakin baik juga pengawasan dan kontrol (controlling) kebijakan intern organisasi perangkat daerah Kota Semarang dalam mengelola APBD. Sehingga dapat berimplikasi pada terukurnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah.

Dalam meningkatkan kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah, SPI juga perlu dipertimbangkan. Hal ini selaras terhadap riset yang diselenggarakan oleh (Ningrum, 2018), (Kiranayanti & Erawati, 2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern ada pengaruhnya positif kepada kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah. Hasilnya yang tidak sama ditunjukkan oleh riset (Riyanti, 2017) yang mengungkapkan yakni sistem pengendalian intern tidak ada pengaruhnya kepada kualitas laporan finansial pemerintahan daerah.

Variabel keempat yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia adalah karakter individu yang dapat diukur dari tingkat pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam men-targetkan keberhasilan sebuah organisasi dan menjadi sebuah aset dalam organisasi tersebut. Kompetensi SDM biasanya mempunyai karakteristik wawasan yang luas, pengetahuan yang

memadai, pengalaman yang pernah dialami untuk perencanaan kebutuhan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor yang menunjukkan kompetensi SDM memberi pengaruh kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah yakni kompetensi SDM mampu membantu mempertimbangkan dana dan mengukur perencanaan jangka panjang dengan matang dengan cara mengukur nilai ergonomis yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah Kota Semarang kepada masyarakat. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia di organisasi perangkat daerah Kota Semarang, maka pengeluaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dapat terencana dan terukur dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Septiana, 2017) dengan hasil kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, bermakna bahwa semakin banyak organisasi perangkat daerah Kota Semarang yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, maka semakin baik juga untuk men-targetkan perencanaan dimasa mendatang. Kompetensi sumber daya manusia mempunyai dampak positif yaitu dapat membantu merencanakan dana APBD dengan baik dan dapat men-targetkan strategi pembenahan daerah dengan efektif dan efisien. Hal ini juga berimplikasi pada meningkatnya kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah dalam badan perangkat daerah Kota Semarang.

Dalam usaha meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia, juga perlu untuk dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Putri et al., 2018), (Lestari & Hastuti, 2020), (Ramadhani et al., 2019), (Kiranayanti & Erawati, 2016) dan (Idward, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Ningrum, 2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu: (Simanjong, 2018) yang memiliki variabel akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini dilakukan kembali karena masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara data dengan fakta dilapangan dan masih terbatas total riset yang diselenggarakan pada negara Indonesia mengenai kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah. Sehingga masih adanya peluang untuk dilakukannya penelitian kembali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di dalam penyusunannya yaitu: penelitian ini menambahkan variabel baru untuk diuji seperti: sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya dilakukan di organisasi perangkat daerah Bandung barat, sementara pada riset berikut dilaksanakan di organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang.

Mengamati opini para ahli (Riyanti, 2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (Simanjorang, 2018) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (Ramadhani et al., 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan (Septiana, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa: akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia mewujudkan fungsi akuntansi dalam mengatur pengelolaan keuangan di sektor organisasi perangkat daerah agar dapat dikendalikan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang terukur, agar dapat menciptakan iklim perekonomian yang stabil sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut dan agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kota Semarang yang tercantum di internet tahun anggaran 2017 ternyata masih banyak kekurangan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang, seperti : belum menyajikan data yang sesuai dengan peraturan pemerintah, hasil pemeriksaan atas dasar sistem pengendalian intern (SPI), kelebihan pembayaran yang dilakukan organisasi perangkat daerah Kota Semarang, terjadi besaran denda keterlambatan pembayaran tagihan klaim

BPJS, dan juga penataan lelang pengerjaan tanah bekas bengkok juga belum berjalan sesuai dengan aturan menimbulkan buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan kembali karena masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara data dengan fakta dilapangan. Dan masih banyak terjadi keraguan terhadap hasil penelitian – penelitian sebelumnya, sehingga masih adanya peluang untuk dilakukannya penelitian kembali. Permintaan masyarakat yang semakin meningkat untuk menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara mendorong organisasi perangkat daerah Kota Semarang untuk menerapkan fungsi akuntansi yang baik seperti menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, SPI, serta kompetensi SDM, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 4) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga riset berikut tujuannya guna memahami:

- 1) Untuk mengujikan pengaruhnya akuntabilitas kepada kualitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
- 2) Untuk mengujikan pengaruhnya transparansi kepada kualitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
- 3) Untuk mengujikan pengaruhnya sistem pengendalian intern kepada kualitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
- 4) Untuk mengujikan kompetensi sumber daya manusia kepada kualitas pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaatnya yang bisa diperoleh melalui riset yakni mencakup:

- 1) Bagi penulis, melalui hasil riset berikut diinginkan bisa meningkatkan dan melakukan pengembangan wawasan diantara keilmuan yang didapatkan saat masa kuliah terhadap realita yang sesungguhnya terjadi dalam lapangan.
- 2) Bagi pemerintahan daerah, hasil riset berikut diinginkan bisa digunakan untuk bahan korelasi guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Bagi pihak lainnya, penulis pun mengharapkan supaya riset bisa dipakai sebagai sumbangsih pemikiran, wawasan, dan digunakan untuk bahan referensi yang

berhubungan terhadap proses menyusun pelaporan finansial pemerintahan daerah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila mempunyai kinerja yang efektif, unggul dan tentunya memiliki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Laporan keuangan pemerintah daerah penting untuk diteliti karena keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu tolok ukur kinerja finansial pemerintah daerah dan bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah untuk tahun sekarang dan tahun berikutnya baik dari segi ekonomi, sosial dan politik yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas yang memadai. Oleh sebab itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang perlu untuk diteliti.

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) dalam (Riyanti, 2017) mengemukakan bahwa keperilakuan teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Konsep teori keagenan di dalam Organisasi sektor publik menjelaskan bahwa pemegang amanah (pemerintah) sebagai (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya seperti mengendalikan sumber daya keuangan terhadap pihak yang memberi amanah atau rakyat sebagai prinsipalnya yang berhak meminta tanggung jawab terkait itu. Teori keagenan ini bisa

digunakan sebagai landasan untuk menyelidiki kinerja organisasi perangkat daerah Kota Semarang. Untuk melakukan tugas kepentingannya *principal* memperkerjakan *agent* untuk melakukan pengambilan kebijakan dan keputusan yang terbaik dalam memajukan daerah Kota Semarang dan dapat menyejahterakan *principal* hingga *principal* merasa puas.

Teori keagenan menjelaskan terdapat hubungan antara pemegang amanah (pemerintah) sebagai *agent* dan pemberi amanah (masyarakat) sebagai *principal*. Terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*) akan mengakibatkan munculnya paradigma antara *agent* dengan *principal* sehingga menimbulkan ketidakpuasan *principal* kepada *agent* dalam mengelola sumber daya daerah. Hal ini menimbulkan penambahan biaya keagenan (*agency cost*) untuk diperlukan komunikasi kembali dalam mengambil kesepakatan bersama untuk mengelola sumber daya daerah yang baik dan bisa menguntungkan bersama. Sebagai *agent*, untuk menjalankan amanahnya ditunjuk untuk memimpin dan mengelola daerah Kota Semarang sehingga ada kemajuan dan kemakmuran di daerah Kota Semarang. Dalam program yang ditanamkan *agent*, masyarakat (*principal*) menginginkan keuntungan yang lebih besar dan cepat untuk kepentingan jangka panjang. Sedangkan dalam praktiknya untuk menjalankan tugas pengelolaan daerah, pemerintah daerah Kota Semarang juga harus memberi kompensasi yang besar kepada *principal* untuk menjalankan programnya yang telah diakomodasi sehingga membuat anggaran untuk mengelola daerah menjadi berkurang dan berimplikasi juga pada kurang maksimalnya pembangunan daerah.

Menyusun pelaporan finansial pemerintahan daerah yang mempunyai kualitas sebagai suatu jawaban yang tepat untuk dapat meminimalisir konflik keagenan antara *principal* dengan *agent*, karenadengan adanya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dapat bermanfaat untuk masyarakat umum dan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah sebenarnya atas sumber daya daerah yang dihasilkan. Menurut (Simanjorang, 2018) informasi keuangan di dalam laporan keuangan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan
- 2). Untuk menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi.
- 3). Untuk membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
- 4). Untuk membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Dalam menciptakan data pelaporan finansial pemerintahan daerah Kota Semarang yang mempunyai kualitas maka perlu mengevaluasi faktor psikologis dan faktor sosiologis. Faktor psikologis dilakukan ketika menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam bentuk motivasi pemerintah daerah Kota Semarang dalam menerapkan manajemen strateginya agar dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik. Sedangkan faktor sosiologis dilakukan ketika menganalisis variabel SPI serta kompetensi SDM pada lingkungan pemerintah daerah Kota Semarang yang tertuang dalam bentuk integritas.

Faktor psikologis pertama yaitu akuntabilitas, dimana laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan pertanggungjawaban yang baik dalam segala tindakan atau langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah Kota Semarang agar dapat diterima oleh publik dengan baik. Faktor psikologis kedua yaitu transparansi, dimana faktor tersebut dapat memberikan bukti yang nyata kepada publik atas segala tindakan pemerintah daerah Kota Semarang agar dapat dicari tahu kebenarannya oleh publik dan agar mendapat kepercayaan penuh dari publik. Selain transparansi juga ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Semarang yaitu faktor sosiologis pertama yaitu sistem pengendalian intern, dirancang untuk membantu organisasi perangkat daerah Kota Semarang agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan administrasi pemerintahan. Cara kerja sistem pengendalian intern yaitu dapat membantu mengarahkan, mengawasi kinerja organisasi pemerintah daerah Kota Semarang agar dapat dikendalikan pengeluaran dana APBD Kota Semarang, dan dapat digunakan kembali untuk keperluan pengembangan daerah kota semarang dengan baik. Sistem pengendalian intern juga bertujuan untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain itu ada faktor sosiologis lain yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas LKPD yakni kompetensi SDM, dimana faktor ini membutuhkan manusia yang berkompeten yang dapat membantu pemerintah daerah Kota Semarang dalam mempertimbangkan dana APBD dan mengukur perencanaan masa depan dengan matang dalam menghadapi

kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang akan berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2 Variabel – Variabel Penelitian

2.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Untuk mencapai kepuasan masyarakat daerah Kota Semarang, dan menumbuhkan iklim perekonomian daerah yang baik maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kota semarang adalah dengan menerbitkan LKPD. LKPD berarti wujud tanggung jawabnya untuk seluruh urusan sumber daya perekonomian yang dimiliki entitas daerah. Sedangkan menurut (Simanjourang, 2018) laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Laporan keuangan pemerintah daerah biasanya menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja finansial pemerintah daerah. Keberadaan LKPD sangat penting untuk dipakai untuk landasa mengambil keputusan pemerintah daerah di tahun sekarang maupun di tahun berikutnya baik dari segi ekonomi, sosial dan politik yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Laporan keuangan yang dilakukan penerbitan wajib dirancang selaras dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diberlakukan supaya pelaporan finansial itu bisa diperbandingkan terhadap pelapora finansial periode lalu ataupun diperbandingkan terhadap pelaporan finansial entitas yang eksplisit.

Supaya bisa menaikkan kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah Kota Semarang juga didorong oleh beberapa faktor pendukung. Semakin banyak faktor yang mendukung dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan (Riyanti, 2017).

2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik bermakna wujud tanggung jawab terkait seluruh wujud kegiatan yang dilaksanakan pemegang amanah atau masyarakat kepada individual yang meminta tanggung jawabnya itu (Simanjorang, 2018). Menurut (Dewi & Hoesada, 2020) Akuntabilitas juga menunjukkan adanya umpan balik yang baik (good feedback) yang berarti dapat diterima dan dapat dibuktikan kebenarannya secara logis. Akuntabilitas Kota Semarang sangat diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah Kota Semarang dan mengidentifikasi resiko kesalahan penyajian data. Penilaian akuntabilitas pemerintah daerah Kota Semarang harus dinilai secara objektif dan independen. Untuk menjamin adanya akuntabilitas yang baik perlu adanya pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan dan keandalan informasi yang disajikan dalam akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas sektor publik memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan

akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Dengan adanya prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Semarang, maka dapat diketahui kejelasan pertanggungjawabannya segala tindakannya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Semarang. Sehingga dapat menumbuhkan iklim perekonomian daerah yang baik, dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan baik dan dapat memberikan pengaruh positif kepada peningkatan kualitas LKPD.

2.2.3 Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik (Simanjorang, 2018). Transparansi didalam organisasi perangkat daerah Kota Semarang bertujuan sebagai akses pembuka informasi warga untuk memperoleh informasi masa sekarang, masa lalu dan masa depan tentang kegiatan pemerintahan. Transparansi juga dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah (Simanjorang, 2018). Transparansi dapat dimonitor oleh masyarakat luas dalam membuat kebijakan – kebijakan yang berlaku oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kota Semarang akan menjamin akses dan kebebasannya tiap individu agar mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah kota semarang. Hal ini berdasarkan

bahwa masyarakat luas juga mempunyai hak supaya meamhami dengan utuh terkait aktivitas pemerintahan daerah Kota Semarang dalam mengelola kebijakan dan sumber daya daerah yang telah dipercayakan kepada organisasi perangkat daerah Kota Semarang (Simanjorang, 2018).

Dengan demikian pemerintah daerah Kota Semarang akan memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat apabila pemerintah daerahkota semarang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi transparansi terhadap publik. Transparansi juga memiliki peran penting sebagai pendeteksi kejadian (rekam jejak) apabila *agent* dan *principal* memiliki informasi yang seimbang maka akan mengurangi perilaku oportunistik. Pihak *principal* dapat meminimalisir anggapan bahwa pihak *agent* tidak dapat dipercaya.

Dengan adanya prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota semarang, maka dapat diketahui kejelasan biaya atas jasa dan barang yang telah diterima, dan dapat menyediakan informasi dengan jelas, akurat dan memadai serta mampu memberikan pengaruh positif kepada organisasi sektor publik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang.

2.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah bentuk perpaduan antara sistem kinerja sumber daya manusia dan sistem kinerja teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Sistem pengendalian

intern yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah Kota Semarang dapat membantu mengarahkan, mengawasi, dan mengukur anggaran (sumber daya daerah) Kota Semarang yang akan digunakan untuk keperluan belanja daerah kota semarang. Tanpa adanya sistem pengendalian intern di ruang lingkup organisasi pemda Kota Semarang, sehingga pemda Kota Semarang akan kesulitan dalam mengelola anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang akan berakibat fatal terhadap menurunnya kualitas LKPD. SPI yang baik dapat diukur sejak awal kegiatan sampai akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tahapan perencanaan dan pengawasan untuk mempercepat waktu pengerjaan yang telah disepakati agar berjalan dengan efektif, efisien dan tanpa memerlukan biaya tambahan dari rencana yang sudah dipersiapkan. Tolak ukur sistem pengendalian intern yang baik yaitu yang mempunyai integritas data, mempunyai ketepatan waktu masukan dan mengunggah datanya, ada mekanisme otoritas dokumen transaksional, tersimpan informasi sumber datanya, memiliki pembagian tanggung jawab, memiliki penetapan kebijakan serta standarisasi akuntansi pemerintah, dan dapat mengimplementasikan kebijakan dan standar akuntansi pemerintah dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan adanya sistem pengendalian intern di organisasi pemerintah daerah Kota Semarang akan membantu mengetahui kejelasan arahan rencana kegiatan pembangunan pemerintah daerah yang telah disepakati sesuai dengan perhitungan waktu yang tepat. Dan dapat meminimalisir perilaku kecurangan oknum

pemangku kepentingan yang tidak bertanggungjawab karena kegiatan tersebut diawasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

2.2.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan dan keterampilan individu yang dapat diukur pengetahuannya serta memiliki karakteristik dalam menargetkan kemajuan sebuah organisasi dan menjadi sebuah aset dalam organisasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu acuan dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas karena seseorang yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang sudah menguasai Standar Akuntansi Pemerintah (Ningrum, 2018).

Kompetensi sumber daya manusia perlu diterapkan di pemerintah daerah Kota Semarang, karena kompetensi sumber daya manusia mempunyai kelebihan dapat membantu mengelola keuangan sumber daya daerah Kota Semarang dengan cermat untuk jangka panjang atau jangka pendek sesuai dengan kebutuhan daerahnya, agar sumber daya daerah Kota Semarang bisa dikelola dengan efektif dan efisien.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang kompeten di organisasi perangkat daerah Kota Semarang, maka tujuan perencanaan dari pemerintah daerah yang sudah di targetkan dapat dikerjakan dengan tepat waktu sehingga dapat menyimpan dana daerah dengan efektif dan efisien. Dan juga dapat merancang pembangunan dengan skala jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah Kota Semarang berpengaruh dalam membantu manargetkan tujuan pembangunan

pemerintah daerah Kota Semarang serta membantu menargetkan kemakmuran masyarakat daerahnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai panduan dalam penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Studi Kasus pada Pemerintah	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Variabel Independen:	1. Akuntabilitas Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

	<p>Kabupaten Bandung Barat).</p> <p>Penelitian Christina Novita Simanjorang (2018).</p>	<p>Akuntabilitas Publik dan Transparansi.</p>	<p>2. Transparansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Akuntabilitas Publik dan Transparansi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
<p>2.</p>	<p>Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>1. Akuntabilitas ada pengaruhnya kepada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>

<p>Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Sukoharjo)</p> <p>Penelitian Fina Riyanti (2017).</p>	<p>Pemerintah Daerah. Variabel Independen: Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern.</p>	<p>2. Transparansi Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Penerapan SPI tidak ada pengaruhnya kepada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
---	--	---

3.	<p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Penelitian Annie Mustika Putri, Linda Hetri Suriyanti, dan Intan Diane Binangkit (2018).</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Variabel</p> <p>Independen:</p> <p>Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.</p>	<p>1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
4.	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen:</p>	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif</p>

	<p>Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto)</p> <p>Penelitian Lola Septiana (2017).</p>	<p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Audit Internal.</p>	<p>dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Peran Audit Internal Tidak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
5.	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas</p>

	<p>Pengelolaan keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat)</p> <p>Penelitian Sindy Fuji Lestari, Hastuti (2020).</p>	<p>Pemerintah Daerah.</p> <p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peran Audit Internal.</p>	<p>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Peran Audit Internal Berpengaruh Secara Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>
6.	<p>Pengaruh Sumber Daya Manusia,</p>	<p>Variabel Dependen:</p>	<p>1. Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif</p>

	<p>Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten) Peneliti Melati Ramadhani (2018).</p>	<p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Independen: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi dan Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.</p>	<p>Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintahan</p>
--	--	--	---

			Berbasis Akrual Berpengaruh Positif
7.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Peneliti Khoirina Kencana Ningrum (2018).	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Signifikan

		Sistem Pengendalian Intern.	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8.	Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Peneliti Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Variabel Independen: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi	1. Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 2. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

		<p>Pemerintahan Berbasis Akrual.</p>	<p>3. Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.</p>
9.	<p>Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi.</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah.</p> <p>Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi</p>	<p>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>

	Penelitian Nurul Nadila Idward (2017).	Informasi dan Akuntabilitas. Variabel Pemoderasi: Sistem Pengendalian Intern.	3. Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
10.	The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of Human Resources, And Use Of	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. (On Quality Of Financial Statements)	1. Standar Akuntansi Pemerintahan mempengaruhi kualitas Laporan keuangan Pemerintah (Pusat dan Daerah). 2. Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi

	<p>Information Technology On Quality Of Financial Statements.</p> <p>Research BY : Ratmi Dewi and Jan Hoesada (2020)</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penggunaan Teknologi Informasi.</p> <p>(The Effect Of Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Competence Of</p>	<p>kualitasLaporan keuangan Pemerintah (Pusat dan Daerah).</p> <p>3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Pusat dan Daerah).</p> <p>4. Penggunaan Teknologi Informasi mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Pusat dan Daerah).</p>
--	--	---	--

		Human Resources, And Use Of Information Technology)	
--	--	---	--

2.4 Pengembangan Hipotesis

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan kumpulan bukti penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dalam jangka per-tahun yang telah dibukukan dari transaksi yang dilakukan pemerintah daerah atas biaya barang dan jasa yang telah diterima untuk pengembangan daerahnya. Oleh karena itu dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik maka keuangan pemerintah daerah dapat berjalan stabil dan kondusif dalam menghadapi kesulitan yang tak terduga. Berikut hasil hipotesis pada penelitian pengaruh akuntabilitas, transparansi, SPI, serta kompetensi SDM kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas dianggap salah satu faktor penting dalam menciptakan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas segala tindakannya dalam mengambil

keputusan dan kebijakanyang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah secara periodik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Fungsi akuntabilitas sendiri untuk menata dan mengelola keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya akuntabilitas yang baik di pemerintah daerah Kota Semarang, maka pemerintah daerah Kota Semarang dapat mengendalikan kondisi perekonomian yang stabil. Jika pemerintah daerah tidak menerapkanakuntabilitas, maka pemerintah daerah tidak bisa mengelola APBD dengan lancar karena tidak ada bentuk pertanggungjawabannya. Pemerintah daerah yang menerapkan akuntabilitas juga perlu mempunyai sifat yang akuntabel, pemerintah daerah yang akuntabel kepada masyarakat akan berimplikasi pada peningkatan kemakmuran masyarakat dan daerahnya. Hal ini disebabkan pemerintah daerah membangun iklim perekonomian daerah yang baik sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Pemerintah yang akuntabel dapat dicerminkan dari tindakannya yang meliputi : menyajikan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara cepat dan tepat, memberikan pelayanan baik dan memuaskan kepada masyarakat, memberikan ruang kepada publik untuk bisa terlibat dalam pembangunan dan pemerintahan, mampu mempertanggungjawabkan dan menjelaskan secara proporsional setiap kebijakan kepada masyarakat, terdapat sarana publik guna menilai pencapaian kegiatan pemerintah daerah.

Hasil hipotesis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Simanjorang, 2018), (Riyanti, 2017) dan (Idward, 2017) yang

memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H1 = Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dilihat secara jelas dan menyeluruh. Transparansi menjadi salah satu syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Semarang, maka keadilan dapat diciptakan.

Transparansi dianggap mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memperoleh dukungan serta kepercayaan masyarakat yang memiliki keuntungan untuk pemerintah daerah untuk menciptakan daerahnya secara baik, selalu membenahi daerahnya untuk masa depan yang baik dan adil sehingga bisa menciptakan iklim daerah yang baik.

Transparansi di pemerintah daerah Kota Semarang dapat membantu mendorong pengungkapan kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu yang menyangkut organisasi sektor publik. Penerapan prinsip transparansi menuntut

pemerintah daerah untuk selalu terbuka yang bertujuan untuk mencegah upaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan menyembunyian informasi yang menyangkut kepentingan publik secara keseluruhan. Penerapan transparansi di pemerintah daerah Kota Semarang dapat dimulai melalui penyajian data dan fakta secara terbuka yang akurat, jujur dan tepat waktu.

Dengan adanya prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota semarang, maka dapat diketahui kejelasan biaya atas jasa dan barang yang telah diterima, dan dapat menyediakan informasi dengan jelas, akurat dan memadai mampu memberikan pengaruh positif kepada organisasi sektor publik sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah kota semarang.

Hasil hipotesis pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Simanjorang, 2018) yang memperoleh hasil bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H2 = Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Intern merupakan salah satu faktor penting dalam mengendalikan lajunya perkembangan daerah di Kota Semarang. Sedangkan

menurut(Ningrum, 2018)sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang tidak terpisahkan dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh pegawai untuk memberikan jaminan yang wajar bagi pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sistem pengendalian intern bekerja dengan memberi arahan dan mengawasi organisasi perangkat daerah Kota Semarang dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Fungsi dari sistem pengendalian intern untuk mengukur anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat terukur dan dapat berjalan dengan tepat sasaran dan tidak ada kebocoran dana sumber daya daerah, dan juga untuk meminimalisir perilaku oknum di lingkungan OPD Kota Semarang yang bertindak tidak bertanggungjawab atas segala perjanjian atau perbuatan yang telah dibuat.

Dengan adanya sistem pengendalian intern di organisasi pemerintah daerah Kota Semarang akan membantu mengetahui kejelasan arahan rencana kegiatan pembangunan pemerintah daerah yang telah disepakati sesuai dengan perhitungan waktu yang tepat. Dan dapat meminimalisir perilaku kecurangan oknum pemangku kepentingan yang tidak bertanggungjawab karena kegiatan tersebut diawasi oleh sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Hasil hipotesis pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2019), (Ningrum, 2018) dan (Kiranayanti &

Erawati, 2016) yang memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H3 = Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4.4 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

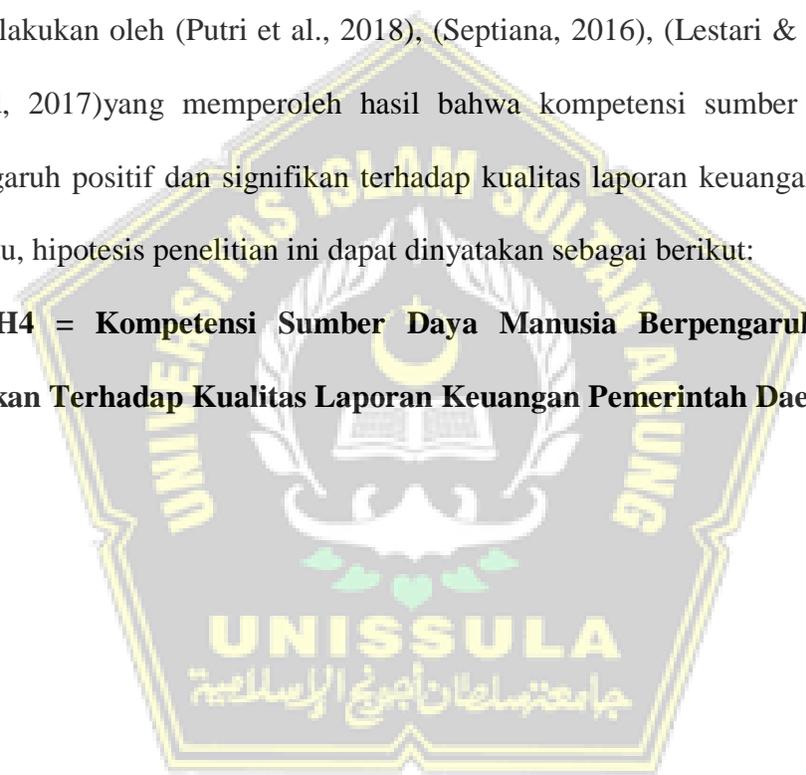
Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai karakteristik individual yang dapat diukur ilmu pengetahuannya serta mampu dalam menargetkan kemajuan dari sebuah organisasi tersebut. Dan menjadi sebuah aset di dalam organisasi tersebut. Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu syarat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten di organisasi perangkat daerah Kota Semarang, maka tujuan perencanaan dari pemerintah daerah dapat diciptakan.

Kompetensi sumber daya manusia dianggap mampu mempengaruhi kinerja organisasi perangkat daerah Kota Semarang agar bekerja secara cermat dan lebih baik lagi. Karena dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten di pemerintah daerah Kota Semarang maka dapat memberikan informasi yang andal agar memperoleh dukungan serta kepercayaan dari masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

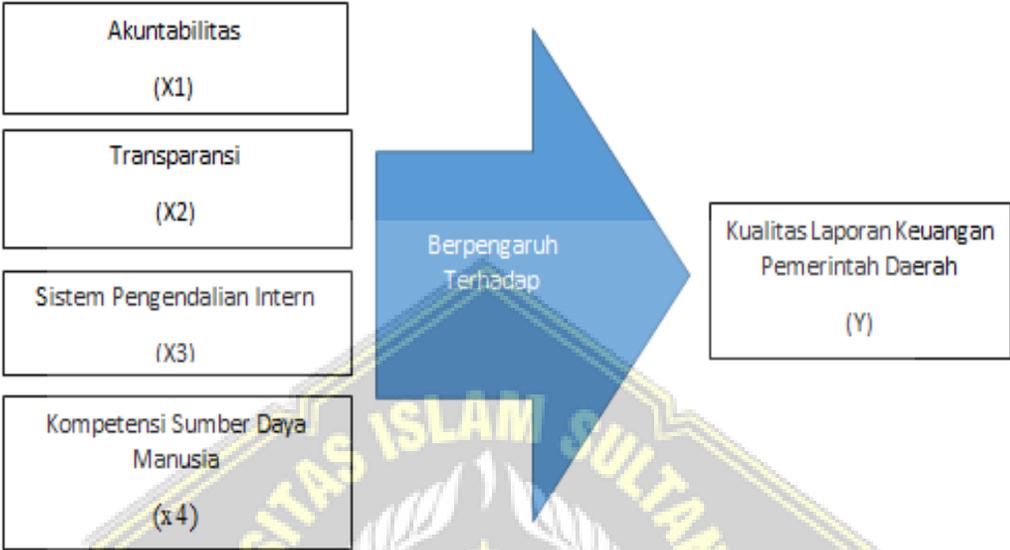
Kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah Kota Semarang berpengaruh dalam membantu menargetkan tujuan pembangunan pemerintah daerah Kota Semarang serta membantu menargetkan kemakmuran masyarakat daerahnya.

Hasil hipotesis kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018), (Septiana, 2016), (Lestari & Hastuti, 2020), (Idward, 2017) yang memperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

H4 = Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis pelaksanaan riset umumnya yaitu metode keilmiahana guna memperoleh data dengan tujuan serta kegunaannya yang khusus (Sugiyono, 2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode sensus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dapat dinyatakan dengan angka serta dapat diukur

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono,2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020) populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi di dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural organisasi perangkat daerah Kota Semarang. Jumlah organisasi perangkat daerah pada Kota Semarang sejumlah 43 organisasi perangkat daerah mencakup 1 Satpol PP, 8 Badan, 22 Dinas, 8 Biro, 1 Sekretariat DPRD, 2 Rumah Sakit, 1 Inspektorat.

Sedangkan sampel menurut (Sugiyono,2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020) yakni bagiannya atas karakteristik yang dipunyai populasinya. Sampel atas riset ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah cara pengumpulan data diselidiki satu per satu dari seluruh elemen populasi. Sampel tersebut dengan kriteria responden:

1. Pejabat struktural organisasi perangkat daerah Kota Semarang yang bekerja di bagian pembukuan atau bagian akuntansi.
2. Pejabat struktural organisasi perangkat daerah Kota Semarang yang sudah mengemban jabatan setidaknya setahun terkait menyusun LKPD.

Tabel 3.2

Populasi dan Sampel Penelitian

No	Nama Dinas	Sampel
1.	Sekretariat DPRD Kota Semarang	2
2.	Sekretariat Daerah	2
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang	3
4.	Dinas Kesehatan Kota Semarang	3
5.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	3
6.	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang	3
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang	3
8.	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	3
9.	Dinas Perikanan Kota Semarang	3
10.	Dinas Perindustrian Kota Semarang	3
11.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang	3

12.	Dinas Sosial Kota Semarang	3
13.	Inspektorat Kota Semarang	3
14.	Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	3
15.	Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	3
16.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	3
17.	Dinas Perdagangan Kota Semarang	3
18.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	3
19.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	3
20.	Dinas Pendidikan Kota Semarang	3
21.	Dinas Perhubungan Kota Semarang	3
22.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	3
23.	Dinas Pertanian Kota Semarang	3
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	3
25.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang	3
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang	3
27.	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang	3
28.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang	3

29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (BKBP)	3
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (BPBD)	3
31.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	3
32.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	3
33.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	3
34.	Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda	2
35.	Biro Hukum Setda	2
36.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda	2
37.	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda	2
38.	Biro Infrastruktur dan SDA Setda	2
39.	Biro Perekonomian Setda	2
40.	Biro Organisasi Setda	2
41.	Biro Umum Setda	2
42.	Biro Administrasi Pengadaan Barang / Jasa	2
43.	Satpol PP	3
44.	Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro	3
	Jumlah	121

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Data primer merupakan yang terkumpul melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (Kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden organisasi perangkat daerah Kota Semarang yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui survei lapangan yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya kuesioner tersebut di distribusikan langsung kepada responden (pegawai keuangan OPD Kota Semarang) dengan harapan untuk memperoleh tingkat pengembalian kuesioner yang tinggi. Setiap responden yang sudah diidentifikasi diberikan kuesioner dan tujuh hari kemudian akan dijemput, dengan maksud jika responden memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait kuesioner akan bisa diberikan oleh peneliti.

Untuk mengukur pendapat responden, lima poin skala likert digunakan, dengan perincian sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Bobot 1
Tidak Setuju (TS)	Bobot 2
Netral (N)	Bobot 3

Setuju (S)	Bobot 4
Sangat Setuju (SS)	Bobot 5

3.5 Variabel – Variabel Penelitian

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen sebagai (Y) dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3.5.2 Variabel Independen

Variabel Independen bermakna variabel yang sebagai sebab ataupun memberi pengaruh atas munculnya variabel terikat. Variabel independen sebagai (X) dalam penelitian ini berjumlah empat buah yaitu: akuntabilitas (X1), transparansi (X2), sistem pengendalian intern (X3), kompetensi sumber daya manusia (X4)

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian dan juga untuk menentukan skala pengukuran dari masing – masing variabel, sehingga pengujian hipotesis menggunakan alat statistik dapat dilakukan dengan benar. Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	Diartikan sebagai prinsip – prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi	Relevan	a).Memiliki manfaat umpan balik (<i>feedback value</i>) membantu kegiatan pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya b).Memiliki manfaat prediktif (<i>predictive value</i>) laporan keuangan	Likert 1-5

	Peraturan n Pemerint ah (PP) No 71 Tahun 2010	Pemerintahan. (Riyanti, 2017)		yang dihasilkan untuk membantu kegiatan instansi yang akan dilakukan selanju t nya c).Laporan finansial wajib dilaporkannya sesuai waktu serta bisa diandalkan	
			Andal	a). Penyajian jujur menjadi faktor terpenting dalam penyajian inform asi laporan keuangan	

				<p>b). Bisa diverifikasikan serta kewajaran informasi sangatlah diperlukan guna kelancaran aktivitas kerjanya</p> <p>c).Netralis dikarenakan kualitas pelaporan finansial wajib betul-betul pasti kebenaran didalamnya</p>	
			<p>Dapat Dibandingkan</p>	<p>a). Pencatatan dilaksanakan dengan berkala selaras terhadap kebijakannya</p>	

				yang tersedia supaya bisa diperbandingkan terhadap periode yang lalu	
			Dapat Dipahami	a).Batas pemaha mandan pengguna informasi laporan keuangan harusbersifatfleks ibel, dapat digunakan dan digunakan oleh pemakai b).Laporan keuangan wajib runtut supaya bisa dipakai serta diamnfaatkannya	

				selaras terhadap kegunaan.	
2.	Akuntabilitas	Adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (Simanjorang, 2018)	Tanggung jawab dan Jujur	Kewajiban agent (pemerintah) untuk memenuhi tanggungjawab atas perbuatannya dalam pengelolaan sumber daya daerah yang menjadi amanahnya	Likert 1-5

			Kejelasan Target	Merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Kejelasan target menerapkan langkah – langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membenahan daerahnya.	
			Netral	Bersifat independen dalam birokrasi pemerintahan	

				Tidak dapat berpihak kepada salah satu pihak.	
			Konsisten dan Dapat Diandalkan	Fokus terhadap langkah – langkah pembenahan daerah yang sudah di setujui oleh DPR	
3.	Transparansi	Adalah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjaw	Akseibilitas Publik	Keteraksesan informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan DPR.	Likert 1-5

	<p>Tahun 2010</p>	<p>aban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. (Simanjourang, 2018)</p>		<p>Keteraksasan informasi sumber daya daerah yang akan dikelola pihak agent (pemerintah daerah) dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan DPR.</p>	
			<p>Kejelasan dan Kelengkap an Informasi</p>	<p>Penjabaran informasi tentang pengelolaan sumber daya daerah yang akan dikelola pemerintah daerah harus</p>	

				<p>disampaikan secara teliti dan lengkap kepada pihak principal (masyarakat dan DPR)</p>	
			<p>Keterbukaan Proses</p>	<p>Keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah daerah untuk mendorong akseibilitas pemerintahan daerah yang baik</p>	

4.	Sistem Pengendalian Intern Sumber: Peraturan Pemerintah dan Nomor 60 Tahun 2008	Adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatanyang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan	Lingkungan Pengendalian (<i>Control Environment</i>)	a). Bekerja sesuai norma-norma yang sudah ditetapkan b). Bekerja sesuai <i>job description</i> yang sudah dibuat agar menghasilkan informasi yang valid	Likert 1-5
----	---	--	--	--	------------

		perundang undangan. (Ningrum, 2018)			
			Penilaian Risiko (<i>Risk Asssment</i>)	a). Pengelolaan Risiko b). Pengendalian Internal c). Mempertimban g kanpotensi tindakan melanggar saat mengevaluasi risiko kepada ketercapaian tujuannya	
			Aktivitas Pengen dalian (<i>Control</i>)	a). menentukan dan melaksanakan pengembangan	

			Activities)	kegiatan pengendaliannya	
			Informasi dan Komunikasi (Informasi and Communication)	a). menciptakan informasi yang mempunyai kualitas baik serta berhubungan b).menghasilkan pelaporan sesuai waktunya	
			Aktivitas Pengawasan (Monitoring Activities)	a). Rekonsiliasi laporan keuangan b). Frekuensi Penilaian Aktivitas	
5.	Kompetensi	Kompetensi	Pengetahuan	a). Kemampuan untuk	Likert 1-5

	<p>Sumber Daya Manusia</p> <p>Sumber: (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013).</p>	<p>Sumber Daya Manusia adalah kemampuan kerja setiap pegawai negeri sipil yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya (Idward, 2017)</p>		<p>memahami tentang pelaporan keuangan b). Kemampuan meng-Upgrade ilmu pengetahuan terkait</p>	
--	---	---	--	--	--

			<p>Keterampilan</p>	<p>a).Keterampilan menampilkan pelaporan finansial selaras terhadap standarisasi yang ditetapkan</p> <p>b). Mengambil inisiatifnya untuk kerja agar ikut pelatihan tata usaha pelaporan finansial</p>	
			<p>Sikap</p>	<p>a).</p> <p>Memprioritaskan kepentingan masyarakat beserta tanggung jawab sosialnya</p>	

				<p>dengan melaksanakan tugas selaras terhadap kode etiknya</p> <p>b). Mengikuti hukum beserta aturan yang diberlakukan</p>	
--	--	--	--	--	--

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh terkait dengan pengaruh antara variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, SPI, kompetensi SDM kepada variabel dependennya yakni kualitas pelaporan finansial pemda, dengan menggunakan program *SPSS for windows* untuk menentukan pengaruh data signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan model regresi linear berganda.

Analisis regresi linier berganda bermaksud untuk memprediksi bagaimana keadaan fluktuasi dari variabel dependen. Analisis regresi berganda akan dilakukan jika jumlah variabel independen minimal 2 (Sugiyono, 2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020). Pengujian ini digunakan untuk menguji akuntabilitas, transparansi, SPI, serta kompetensi SDM kepada kualitas pelaporan finansial pemda dengan bersamaan.

3.7.1 Statistik Deskriptif

Menganalisis statistik deskriptif di riset ditampilkan guna memberi ilustrasi terkait karakteristik deskriptif dari keadaan setiap variabel riset yang tersedia. Apakah variabel transparansi, akuntabilitas, SPI, serta kompetensi SDM ada pengaruhnya kepada kualitas pelaporan finansial pemerintahan daerah. Serta apakah sudah berlangsung secara baik dan betul betul dirasakan oleh publik. Analisis statistik deskriptif juga menggambarkan kondisi variabel kualitas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di kota semarang, apakah kondisi laporan keuangan itu telah baik serta akurat ataupun tidak.

3.7.2 Uji Kualitas Data

Sebelum data riset dilakukan pengolahan secara lanjutan, lebih dulu diujikan kepada kualitas datanya. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrument kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Ghozali, 2018) dalam (Ramadhani et al., 2019). Uji ini terdiri atas uji validitas dan reliabilitas.

3.7.3 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,2018) dalam (Ramadhani et al., 2019). Kriteria kelayakan suatu instrumen yang telah ditetapkan yakni:

- 1) Instrumen bisa disebut valid manakala nilainya korelasi (r hitung) $> r$ tabel ataupun nilainya prob. sig. $< (= 5\%)$.
- 2) Instrumen bisa disebut tidak valid manakala nilainya korelasi (r hitung) $\leq r$ tabel ataupun nilainya prob. sig. $\geq (= 5\%)$.

3.7.4 Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali (2018) dalam (Ramadhani et al., 2019), uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk yang akan diteliti. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan tidak ada perubahan. Kriteria yang ditentukan agar memahami data yakni nilai atau skor koefisien reliabilitas alpha yang lebih tinggi daripada 0,60. Manakala nilainya koefisien reliabilitas alpha melebihi 0,60 sehingga instrumen ukur variabelnya bisa disebut andal.

3.7.5 Uji Asumsi Klasik

Menguji Asumsi klasik adalah analisis yang dilaksanakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik (Ghozali,2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020). Menguji asumsi klasik diselenggarakan sejumlah tiga jenis menguji asumsi klasik yakni pengujian multikolinearitas serta pengujian normalitas. Uji ini dilaksanakan supaya mengambil datanya dalam riset mempergunakan data kuesioner murni.

3.7.6 Uji Normalitas

Menguji normalitas berarti uji yang dilaksanakan untuk prasyarat guna menganalisis datanya (Ghozali, 2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020). Menguji normalitas dilaksanakan sebelum datanya dilakukan proses mengacu pada pemodelan riset yang diajukan. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu *Kolmogorov-smirnov*. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%, maka distribusi data dalam penelitian dinyatakan normal.

Uji statistik *kolmogorov-smirnovtest* menurut (Ghozali, 2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020) dapat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $\text{sig} > 0,05$, maka data tersebut terdistribusi nomal.
- Jika $\text{sig} < 0,05$, maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

3.7.7 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas adalah tahap kedua untuk melengkapi uji asumsi klasik. Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolonieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance value* serta *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi jika nilai *tolerance value* lebih kecil dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih besar dari 95% dan nilai VIF lebih besar dari 10. Apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan obyektif.

3.7.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam menguji menganalisis regresi linear berganda dilakukan pengembangan persamaan guna mengungkapkan korelasi antarvariabel dependennya yakni Y (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) dengan variabel independennya yakni X1 (Akuntabilitas) , X2. (Transparansi) , X3 (Sistem Pengendalian Intern), X4 (Kompetensi Sumber Daya Manusia). Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui keadaan fluktuatif dari variabel independen terhadap variabel dependen menurut (Ghozali, 2018) dalam (Ramadhani et al., 2019). Analisis regresi linear berganda dapat ditentukan yakni:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- X1 = Akuntabilitas
- X2 = Transparansi
- X3 = Sistem Pengendalian Intern
- X4 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- b1 = Koefisien Regresi Akuntabilitas
- b2 = Koefisien Regresi Transparansi
- b3 = Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Intern
- b4 = Koefisien Regresi Kompetensi Sumber Daya Manusia
- α = konstanta
- e = error

3.7.9 Uji F

Menurut (Ghozali,2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020) Uji F dilaksanakan guna mengujikan pengaruhnya beragam variabel independennya yaitu akuntabilitas, transparansi, SPI serta kompetensi SDM kepada variabel dependen yaitu kualitas LKPD secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara bersama-sama variabel independen (X1 = akuntabilitas, X2 = transparansi, X3 = sistem pengendalian intern, dan X4 = kompetensi sumber daya manusia) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel independen (X1, X2, X3 dan X4) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).

3.7.10 Uji t

Menurut (Ghozali,2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020) mengatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menguji t dipakai supaya memahami keterampilan setiap variabel independennya dengan parsial atau individual saat menerangkan tingkah laku variabel dependennya. Uji dilaksanakan melalui penggunaan tingkatan sig. 0,05 ($\alpha=5\%$). Penolakan ataupun penerimaan hipotesis dilaksanakan menggunakan kriteria yaitu:

1. Jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah..
2. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara parsial variabel X1, X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.7.11 Koefisien Determinasi R-Square (R²)

Menurut (Ghozali, 2018) dalam (Lestari & Hastuti, 2020) mengatakan bahwa koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Bagi regresi dengan variabel bebasnya melebihi dua berarti dipakai adjusted R² untuk koefisien determinasinya. Nilai R² kisaran nol hingga satu, manakala R²= 0 maknanya tidak terdapat korelasi diantara variabel terikat terhadap variabel bebasnya, sementara manakala R²= 1 bermakna ada relasi yang mencapai kesempurnaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan media penyebaran kuesioner kepada Kepala Dinas dan Staff bagian keuangan OPD Kota Semarang.

Hasil menyebarkan kuesioner yang dilaksanakan didapatkan datanya diamati dalam tabel 4.1 yang menandakan dengan sederhana terkait total maupun tingkatan kuesioner yang dikembalikan dan diberi jawaban oleh respondennya.

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	132	100%
Kuesioner yang kembali	121	91,67%
Kuesioner yang tidak kembali	11	8,33%

Kuesioner yang cacat (tidak dapat diolah)	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	121	91,67%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Dari table 4.1 menunjukkan bahwa 132 jumlah kuesioner yang disebarkan terhadap respondennya, kuesioner yang dilakukan pengembalian terhadap periset sebanyak 121 lembar dengan presentase 91,67% , kuesioner yang tidak kembali sebanyak 11 lembar dengan presentase 8,33% , kuesioner yang ada kecacatan (tidak bisa dilakukan pengolahan) sejumlah 0 lembar dengan presentase 0% sementara kuesioner yang bisa dilakukan pengolahan sejumlah 121 lembar dengan presentase 91,67%.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :

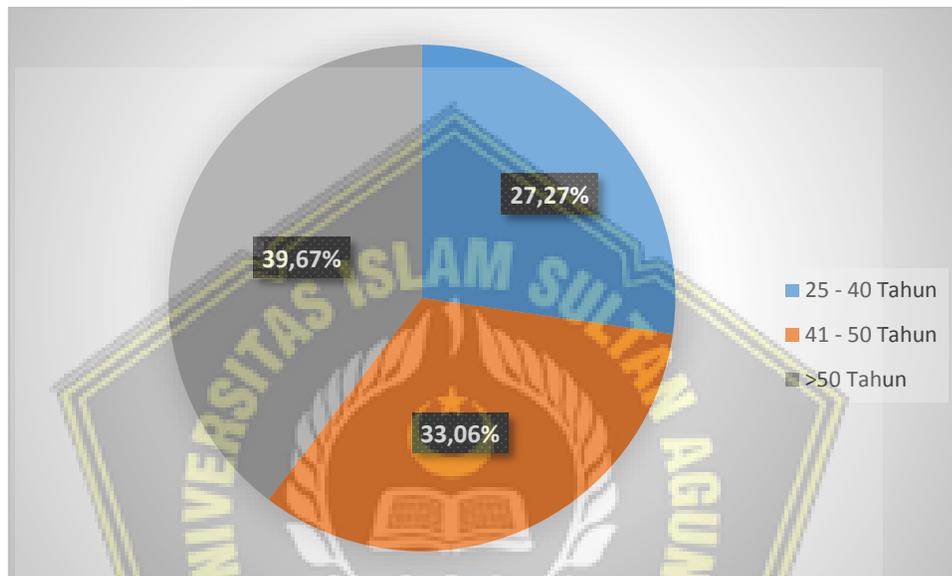
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase
25 – 40 Tahun	33	27,27%
41 – 50 Tahun	40	33,06%
>50 Tahun	48	39,67%

Total	121	100%
-------	-----	------

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur



Dari diagram diatas disimpulkan bahwa responden dari OPD Kota Semarang terbanyak adalah yang mempunyai umur diatas 50 Tahun yang memiliki jumlah 48 orang dengan presentase 39,67% , selanjutnya responden terbanyak kedua adalah yang mempunyai kisanan umur 41 – 50 Tahun yang memiliki jumlah 40 orang dengan presentase 33,06% , dan diposisi terakhir yang mempunyai kisanan umur 25 – 40 Tahun memiliki jumlah responden sebanyak 33 orang dengan presentase 27,27%.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

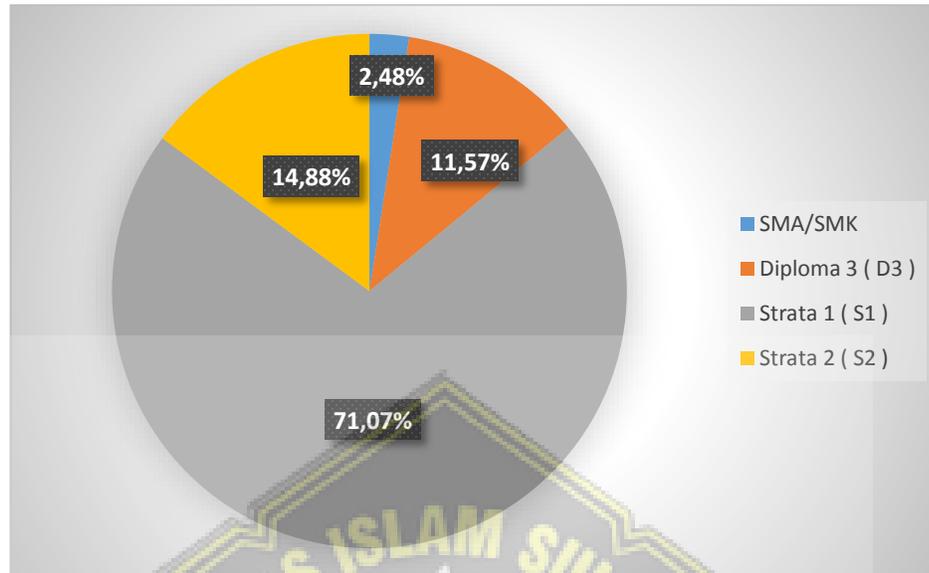
Karakteristik respondennya mengacu pada pendidikan terakhir bisa diamati dalam tabel 4.3 ini :

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	3	2,48%
Diploma 3 (D3)	14	11,57%
Strata 1 (S1)	86	71,07%
Strata 2 (S2)	18	14,88%
Total	121	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022



Gambar 4.2 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Mengamati diagram tersebut menandakan yakni respondennya paling banyak yang menempuh pendidikan di OPD Kota Semarang adalah Strata 1 (S1) yang berjumlah 86 Orang dengan presentase 71,07% , kemudian terbanyak kedua adalah yang menempuh pendidikan Strata 2 (S2) yang berjumlah 18 orang dengan presentase 14,88% , selanjutnya diposisi ketiga responden OPD Kota Semarang adalah yang mempunyai pendidikan Diploma 3 (D3) yang berjumlah 14 orang dengan presentase 11,57% , dan diposisi terakhir responden OPD Kota Semarang adalah yang mempunyai pendidikan terakhir SMA/SMK yang berjumlah 3 individu berpresentase 2,48%.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

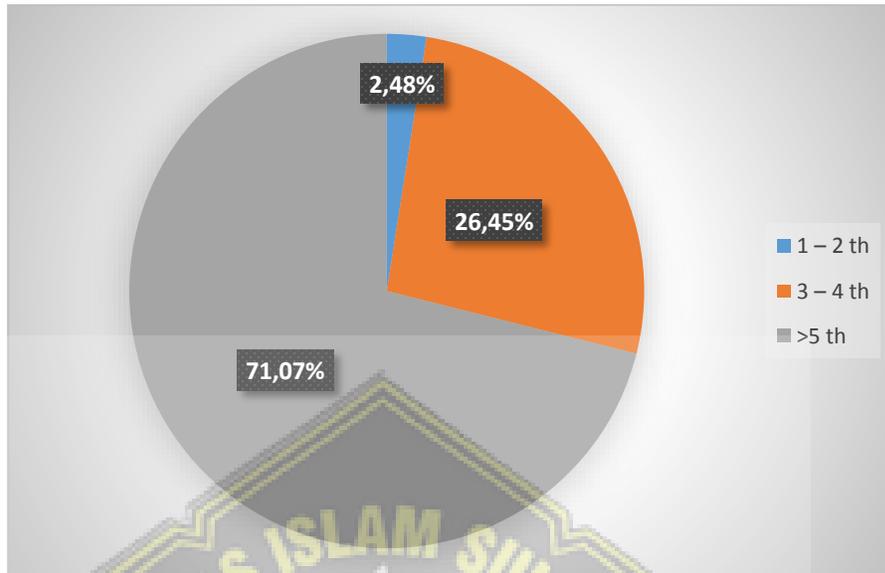
Karakteristik responden mengacu pada pendidikan terakhirnya bisa diamati dalam tabel 4.4 ini :

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Lama Kerja	Jumlah	Presentase
1 – 2 th	3	2,48%
3 – 4 th	32	26,45%
>5 th	86	71,07%
Total	121	100%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022



Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan diagram tersebut menandakan yakni responden paling banyaknya yang telah bekerja di OPD Kota Semarang Bagian Keuangan adalah yang mempunyai masa kerja >5 Tahun (di atas 5 Tahun) dengan jumlah 86 individu berpresentase 71,07% , Kemudian responden terbanyak kedua yang telah bekerja di OPD Kota Semarang Bagian Keuangan adalah yang mempunyai masa kerja 3 – 4 tahun dengan jumlah 32 orang dengan presentase 26,45% , Selanjutnya dengan urutan yang terakhir responden di OPD Kota Semarang yang telah bekerja di bagian Keuangan adalah yang mempunyai masa kerja 1 – 2 tahun dengan jumlah 3 individu berpresentase 2,48%.

4.2.1 Tanggapan Variabel

Skor dari jawaban responden OPD Kota Semarang yang berkaitan dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan variabel independen yaitu : akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia dapat dikemukakan dalam bentuk tabel – tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5
Tanggapan Akuntabilitas

Indikator	Tanggapan Responden terhadap Variabel Akuntabilitas (X1)										Total	Σ Skor (a ₁ + a ₂ + a ₃ + a ₄ + a ₅)	Mean
	STS (Skor 1)		TS (Skor 2)		N (Skor 3)		S (Skor 4)		SS (Skor 5)				
	F	FXS (a ₁)	F	FXS (a ₂)	F	FXS (a ₃)	F	FXS (a ₄)	F	FXS (a ₅)			
(X1).1	0	0	0	0	0	0	74	296	47	235	121	531	326

(X1).2	0	0	0	0	0	0	67	268	54	270	538	329,5
(X1).3	0	0	0	0	12	36	55	220	54	270	526	323,5
(X1).4	0	0	0	0	4	12	61	244	56	280	536	328,5
Rata-rata Variabel X1											326,8	75

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2022

Keterangan : F : Tanggapan Responden S : Skor

Tanggapan responden mengenai Akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.5 yang menjelaskan bahwa sebagian responden OPD Kota Semarang memberi respons positif kepada variabel akuntabilitas. Dibuktikan melalui rerata skornya sejumlah 326,875 yang bisa diklasifikasikan yaitu respons itu baik atau bagus. Akuntabilitas memberi respons paling tinggi yakni dalam parameter atau indikator “mampu mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan” dengan skor 329,5. Hal ini menjelaskan bahwa responden mampu mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Sedangkan tanggapan responden terendah terletak pada indikator “mampu mempertanggungjawabkan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan” dengan skor 323,5. Hasilnya riset tersebut menandakan dari segi general ada evaluasi paling baik dari responden kepada indikatornya di tabel tersebut.

Tabel 4.6

Tanggapan Transparansi

Indikator	Tanggapan Responden terhadap Variabel										Total	Σ Skor	Mean	
	Transparansi (X2)													
	STS (Skor 1)	TS (Skor 2)	N (Skor 3)	S (Skor 4)	SS (Skor 5)									
	F	FXS (a ₁)	F	FXS (a ₂)	F	FXS (a ₃)	F	FXS (a ₄)	F	FXS (a ₅)	Kueis oner	a ₃ +	a ₄ +	a ₅)
(X2). 5	0	0	0	0	8	24	62	248	51	255	121	527	324	
(X2). 6	0	0	0	0	12	36	58	232	51	255		523	322	

(X2).	6	6	4	8	10	30	67	268	34	170		482	301,5
7													
(X2).	0	0	7	14	20	60	49	196	45	225		495	308
8													
Rata-rata Variabel X2												313,8	
													75

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2022

Keterangan : F : Tanggapan Responden S : Skor

Tanggapan responden mengenai Transparansi dapat dilihat pada tabel 4.6 yang menjelaskan bahwa sebagian responden OPD Kota Semarang memberi respons positif kepada variabel transparansi. Dibuktikan melalui rerata skornya sejumlah 313,875 yang bisa diklasifikasikan yaitu respons itu baik atau bagus. Transparansi memberi respons paling tinggi yakni dalam parameter atau indikator “Disediakan kemudahan mengakses informasi APBD Kepada publik“ dengan skor 324. Hal ini membuktikan bahwa responden menyediakan kemudahan mengakses informasi APBD Kepada publik. Sedangkan tanggapan responden terendah terletak pada indikator “mampu mempertanggung jawabkan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan” dengan skor 301,5 . Hasilnya riset tersebut menandakan dari segi general ada evaluasi paling baik dari responden kepada indikatornya di tabel tersebut.

Tabel 4.7

Tanggapan Sistem Pengendalian Intern

Indikator	Tanggapan Responden terhadap Variabel										Total	Σ Skor	Mean
	Sistem Pengendalian Intern (X3)												
	STS		TS		N		S		SS				
	(Skor 1)		(Skor 2)		(Skor 3)		(Skor 4)		(Skor 5)				
	F	FXS (a ₁)	F	FXS (a ₂)	F	FXS (a ₃)	F	FXS (a ₄)	F	FXS (a ₅)	Kuesioner	a ₁ + a ₂ + a ₃ + a ₄ + a ₅)	
9	(X3).	0	0	0	6	18	72	288	43	215	121	521	321
10	(X3).	0	0	0	6	18	71	284	44	220		522	321,5
11	(X3).	0	0	0	0	0	74	296	47	235		531	326

(X3).	0	0	0	0	0	0	66	264	55	275		539	330
12													
Rata-rata Variabel X3												324,6	
												25	

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2022

Keterangan : F : Tanggapan Responden S : Skor

Tanggapan responden mengenai Sistem Pengendalian Intern dapat dilihat pada tabel 4.7 yang menjelaskan bahwa sebagian responden OPD Kota Semarang memberi respons positif kepada variabel SPI. Dibuktikan melalui rerata skornya sejumlah 324,625 yang bisa diklasifikasikan yaitu respons itu baik atau bagus. Sistem pengendalian intern memberi respons paling tinggi yakni dalam parameter atau indikator “Pimpinan selalu menindak lanjuti setiap hasil temuan/riviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat dan selalu melakukan perbaikan pengendalian intern“ dengan skor 330. Hal ini membuktikan bahwa responden yang bekerja sebagai pimpinan di OPD Kota Semarang selalu menindak lanjuti setiap hasil temuan/riviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat dan selalu melakukan perbaikan pengendalian intern. Sedangkan tanggapan responden terendah terletak pada indikator “Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian

intern” dengan skor 321. Hasilnya riset tersebut menandakan dari segi general ada evaluasi paling baik dari responden kepada indikatornya di tabel tersebut.

Tabel 4.8

Tanggapan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator	Tanggapan Responden terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)										Total	Σ Skor (a ₁ + a ₂ + a ₃ + a ₄ + a ₅)	Mean	
	STS (Skor 1)		TS (Skor 2)		N (Skor 3)		S (Skor 4)		SS (Skor 5)					Kuesioner
	F	FXS (a ₁)	F	FXS (a ₂)	F	FXS (a ₃)	F	FXS (a ₄)	F	FXS (a ₅)				
(X4). 13	0	0	0	0	6	18	68	272	47	235	121	525	323	
(X4). 14	0	0	0	0	6	18	61	244	54	270		532	326,5	

(X4). 15	0	0	0	0	2	6	59	236	60	300	542	331,5
(X4). 16	0	0	0	0	2	6	62	248	57	285	539	330
Rata-rata Variabel X4											327,7	5

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2022

Keterangan : F : Tanggapan Responden S : Skor

Respons responden terkait Kompetensi SDM bisa diamati dalam tabel 4.8 yang menjabarkan yakni beberapa responden OPD Kota Semarang merespon positif kepada variabel kompetensi SDM. Dibuktikan melalui rerata skornya sejumlah 327,75 yang bisa diklasifikasikan yakni respons itu baik. Sistem pengendalian intern memberi respons paling tinggi yakni dalam indikator “mampu berkontribusi dengan baik kepada publik atas aktivitas kinerja untuk mencapai tujuan organisasi “ dengan skor 331,5. Hal ini membuktikan bahwa responden yang bekerja sebagai pimpinan di OPD Kota Semarang mampu berkontribusi dengan baik kepada publik atas aktivitas kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara respons responden paling rendah ada dalam indikator “mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010” dengan skor 323. Hasilnya tersebut

menandakan dari segi general ada evaluasi paling baik dari responden kepada indikatornya di tabel tersebut.

Tabel 4.9

Tanggapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator	Tanggapan Responden terhadap Variabel										Total	Σ	Mean
	Kualitas LKPD (Y)												
	STS (Skor 1)	TS (Skor 2)	N (Skor 3)	S (Skor 4)	SS (Skor 5)	FXS (a ₁)	FXS (a ₂)	FXS (a ₃)	FXS (a ₄)	FXS (a ₅)			
(Y). 17	0	0	0	0	2	6	71	284	48	240	121	530	325,5
(Y). 18	0	0	0	0	2	6	60	240	59	295		541	331

(Y). 19	0	0	0	0	0	0	54	216	67	335	551	336
(Y). 20	0	0	1	2	23	69	60	240	37	185	496	308,5
Rata-rata Variabel Y											325,2	5

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2022

Keterangan : F : Tanggapan Responden S : Skor

Respons responden terkait Kualitas LKPD bisa diamati dalam tabel 4.9 yang menjabarkan yakni beberapa responden OPD Kota Semarang merespon positif kepada variabel kompetensi SDM. Dibuktikan melalui rerata skornya sejumlah 325,25 yang bisa diklasifikasikan yaitu respons itu baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memberikan respon paling tinggi yakni dalam indikator “Informasi laporan keuangan diberikan secara lengkap yang berguna untuk pengambilan keputusan” dengan skor 336. Hal ini membuktikan bahwa responden yang bekerja sebagai pimpinan di OPD Kota Semarang mampu memberikan Informasi laporan keuangan secara lengkap guna untuk pengambilan keputusan. Sementara respons responden paling rendahnya ada dalam indikator “menampilkan grafik, diagram dan tabel hasil kinerja pemerintah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan” dengan skor 308,5.

Hasilnya riset tersebut menandakan dari segi general ada evaluasi paling baik dari responden kepada indikatornya di tabel tersebut.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel pada riset berikut dianalisisnya mempergunakan menganalisis statistik deskriptif. Menganalisis ini mencakup total riset, maksimum, minimum, rerata, media, serta standar deviasinya. Di bawah ini yaitu pendeskripsian analitik hasil dengan dibantu *software* statistik.

Tabel 4.10
Analisis Statistik Deskriptif

		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Akuntabilitas	Transparansi	Sistem Pengendalian Intern	Kompetensi Sumber Daya Manusia
N	Valid	121	121	121	121	121
	Missing	0	0	0	0	0
	Mean	17.48	17.61	16.67	17.46	17.67
	Median	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00
	Std. Deviation	1.849	1.795	2.561	1.919	1.985
	Minimum	14	15	9	15	14

Maximum	20	20	20	20	20
---------	----	----	----	----	----

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan data yang disajikan oleh tabel 4.10 dapat di paparkan melalui penggambaran data yang digunakan dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki jumlah sampel sebanyak 121, dengan nilai minimum 14, nilai maximum 20, nilai mean (rata-rata) 17,48, nilai median (nilai tengah) 17,00 dan standar deviation atau simpangan baku sebesar 1,849
- b. Akuntabilitas mempunyai total sampelnya sejumlah 121, yang bernilai minimum 15, nilai maximum 20, nilai mean (rata-rata) 17,61, nilai median (nilai tengah) 17,00 dan standar deviation ataupun simpangan baku sejumlah 1,795
- c. Transparansi mempunyai total sampelnya sejumlah 121, bernilai minimumnya 9, nilai maximum 20, nilai mean (rata-rata) 16,67, nilai median (nilai tengah) 16,00 dan standar deviation ataupun simpangan baku sejumlah 2,561
- d. SPI mempunyai total sampelnya sejumlah 121, bernilai minimum 15, nilai maximum 20, nilai mean (rata-rata) 17,46 , nilai median (nilai tengah) 16,00 dan standar deviation atau simpangan baku sebesar 1,919
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki jumlah sampel sebanyak 121, dengan nilai minimumnya 14, nilai maximum 20, nilai mean (rata-rata) 17,67 , nilai median (nilai tengah) 16,00 sementara standar deviasinya sejumlah 1,985

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu alat pengujian terhadap instrument kuesioner yang dibentuk sebagaimana mestinya untuk mengukur keakuratan hasil dari penyebaran kuesioner yang diperoleh dari jawaban responden oleh peneliti. Data yang valid dijadikan instrumen penelitian adalah data yang baik. Kriteria kelayakan suatu instrumen yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Instrumen bisa disebut valid manakala nilainya korelasi (r hitung) $>$ r tabel ataupun nilainya prob. sig. $<$ ($=$ 5%).
- 2) Instrumen bisa disebut tidak valid manakala nilainya korelasi (r hitung) \leq r tabel ataupun nilainya prob. sig. \geq ($=$ 5%).

Tabel 4.11

Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai r hitung	r tabel (N=100)	Keterangan
Akuntabilitas	P1	0,520	0,195	Valid
	P2	0,550	0,195	Valid
	P3	0,550	0,195	Valid
	P4	0,611	0,195	Valid
	Total	0,686	0,195	Valid

Transparansi	P1	0,439	0,195	Valid
	P2	0,374	0,195	Valid
	P4	0,238	0,195	Valid
	Total	0,395	0,195	Valid
Sistem Pengendalian Intern	P1	0,736	0,195	Valid
	P2	0,753	0,195	Valid
	P3	0,723	0,195	Valid
	P4	0,608	0,195	Valid
	Total	0,779	0,195	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia	P1	0,654	0,195	Valid
	P2	0,510	0,195	Valid
	P3	0,675	0,195	Valid
	P4	0,647	0,195	Valid
	Total	0,692	0,195	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	P1	0,840	0,195	Valid
	P2	0,802	0,195	Valid
	P3	0,786	0,195	Valid
	P4	0,745	0,195	Valid
	Total	1	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2022

Tabel 4.11 tersebut menandakan hasil menguji kevaliditasan dari variabel independen : akuntabilitas (X1), transparansi (X2), sistem pengendalian intern (X3), kompetensi sumber daya manusia (X4) dan variabel dependen : Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Variabel akuntabilitas mencakup empat item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan skor r hitung $>$ r tabel melalui penggunaan 121 sampel respondennya.
2. Variabel transparansi mencakup tiga item pertanyaan dan seluruhnya dikatakan valid dikarenakan skor r hitung $>$ r tabel melalui penggunaan 121 sampel responden.
3. Variabel SPI mencakup empat item pertanyaan dan seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel melalui penggunaan 121 sampel respondennya.
4. Variabel kompetensi SDM mencakup empat item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel melalui penggunaan 121 sampel responden.
5. Variabel kualitas LKPD mencakup empat item pertanyaan serta seluruhnya dikatakan valid dikarenakan r hitung $>$ r tabel melalui penggunaan 121 sampel respondennya.

4.4.2 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan pada item pertanyaan yang mempunyai pertanyaan valid, uji berikut mempergunakan teknik *Cronbach Alpha (a)* dengan SPSS. *Cronbach Alpha* menjabarkan hubungan diantara skala yang diciptakan dengan seluruh variabel skalanya yang tersedia. Manakala skor koefisien alpha > 0,60 , berarti bisa dimaknai yaitu instrumen riset andal. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan pada tabel 4.12 :

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Pertanyaan	Keterangan
Akuntabilitas	0,824	4	Reliabel
Transparansi	0,805	3	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,928	4	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,915	4	Reliabel

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,792	4	Reliabel
---	-------	---	----------

Sumber: Data yang diolah SPSS,2022

Melihat tabel 4.12 bisa diamati dalam variabel akuntabilitas memiliki a hitung $0,824 > 0,6$, variabel transparansi mempunyai a hitung $0,805 > 0,6$, variabel SPI mempunyai a hitung $0,928 > 0,6$, variabel kompetensi SDM mempunyai a hitung $0,915 > 0,6$, variabel kualitas LKPD mempunyai a hitung $0,792 > 0,6$. Sehingga bisa berkesimpulan yakni semua variabel memiliki data yang reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Hasil Uji Normalitas

Menguji normalitas bermaksud guna memahami data yang sudah dihimpun pada saat menguji variabel independen yakni: transparansi, akuntabilitas, SPI, kompetensi SDM, serta variabel dependennya yakni kualitas LKPD didistribusikan dengan normal ataupun tidak. Pada riset berikut, metode menguji normalitas yang dipakai yakni menguji statistik *Konglomorov Smirnov*.

Kriteria menguji mempergunakan menganalisis grafik *normal probability plot* yakni data disebut terdistribusikan dengan normal manakala titiknya tersebar di kisaran garis diagonal serta ikut pada arah garis diagonalnya. Kebalikannya, data disebut tidak berdistribusikan normal bila titiknya tersebar dari garis ataupun tidak

ikut diagonal. Dalam menguji statistik *Konglomerov Smirnov*. Data disebut berdistribusikan normal bila nilainya sig. melebihi 0,05. Di bawah ini hasil menguji normalitas menganalisis grafik normal *probability plot* ditunjukkan dalam gambar ini :

Tabel 4.13

Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		121
Normal Parameters ^a	Mean	17.50
	Std. Deviation	1.844
Most Extreme	Absolute	0,206
	Positive	0,206
	Negative	-0,193
<i>Kongmogorov-Smirnov Z</i>		0,206
Asymp. Sig (2-tailed)		0,000 ^e

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat diartikan bahwa hasil uji normalitas *kolmogrov smirnov* berada dibawah nilai probabilitas yaitu 0,5 yang berarti data dalam penelitian ini tidak

terdistribusi secara normal. Williams, Grajales & Kurkiewicz (2013) mengatakan bahwa semakin besar sampel, maka (non)normalitas residual menjadi kurang penting. Pada penelitian ini menggunakan sampel besar oleh karena itu tidak akan mempengaruhi hasil penelitian.

4.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas pada suatu model. Regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Hasil
Akuntabilitas	0,451	2.217	Tidak Terdapat Multikolonieritas
Transparansi	0,534	1.872	Tidak Terdapat Multikolonieritas

Sistem Pengendalian Intern	0,403	2.479	Tidak Terdapat Multikolonieritas
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,384	2.603	Tidak Terdapat Multikolonieritas

Sumber: Data yang diolah SPSS,2022

Dari hasil uji multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolonieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance $>0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terdapat multikolonieritas.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Supaya memahami pengaruhnya transparansi, akuntabilitas, SPI, serta kompetensi SDM kepada kualitas LKPD Kota Semarang bisa dilaksanakan melalui penggunaan uji menganalisis regresi linear berganda. Mengamati hasil mengolah data yang mempergunakan bantuan spss didapatkan hasilnya dari menguji tabel 4.16 :

Tabel 4.15

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.655	1.024		1.615	0,109
Akuntabilitas	0,219	0,079	0,212	2.783	0,006
Transparansi	-0,105	0,072	-0,102	-1.456	0,148
Sistem Pengendalian Intern	0,416	0,077	0,433	5.390	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,343	0,077	0,369	4.479	0,000

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2022

Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.15 adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,655 + 0,219 X_1 + 0,105 X_2 + 0,416 X_3 + 0,343 X_4 + e$$

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Keterangan :

1. Hasil persamaan regresi berganda, nilai konstanta sebesar 1,655, dapat diartikan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3) dan Kompetensi Sumber Daya manusia (X4) dianggap konstan maka tingkat kualitas LKPD konstan sebesar 1,655.
2. Koefisien regresi variabel akuntabilitas sebesar 0,219, dapat diartikan bahwa akuntabilitas mengalami kenaikan 1% maka peningkatan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,219 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Koefisien regresi variabel transparansi sebesar 0,105, dapat diartikan bahwa transparansi mengalami kenaikan 1% maka peningkatan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,105 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,416, dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern mengalami kenaikan 1% maka kenaikan kepada kualitas LKPD sejumlah 0,416 yang berasumsi variabel independennya yang lain itu bernilai konstan.
5. Koefisien regresi kompetensi SDM sejumlah 0,343, dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia mengalami kenaikan 1% maka peningkatan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejumlah 0,343 yang berasumsi variabel independennya yang lain itu bernilai konstan.

4.6.2 Hasil Uji – t

Menguji ini dilaksanakan guna mengujikan hipotesis serta melaksanakan identifikasi apakah variabel independen (X) ada pengaruhnya dengan bersignifikan kepada variabel dependen (Y). Uji t memiliki kriteria hasil penerimaan atau penolakan yakni:

- a. Manakala nilainya sig. $t < 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ sehingga dengan berparsial variabel independen (X) ada pengaruhnya kepada variabel dependen (Y) maknanya H_0 ditolak, H_a diterima ataupun istilah lainnya hipotesis diterima.
- b. Manakala nilainya sig. $t > 0,05$ ataupun $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ berarti dengan berparsial variabel independen (X) tidak ada pengaruhnya kepada variabel dependen (Y) bermakna H_0 diterima, H_a ditolak ataupun istilah lainnya hipotesis ditolak.

Tabel 4.16

Hasil Uji – t

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficient	T	Sig.
		Beta		

	B	Std. Error			
(Constant)	1.655	1.024		1.615	0,109
Akuntabilitas	0,219	0,079	0,212	2.783	0,006
Transparansi	-0,105	0,072	-0,102	-1.456	0,148
Sistem Pengendalian Intern	0,416	0,077	0,433	5.390	0,000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,343	0,077	0,369	4.479	0,000

Sumber: Data yang diolah SPSS, 2022

Mengamati tabel 4.16 bisa berkesimpulan terkait hasil pengujian hipotesisnya dengan berparsial dari setiap variabel independen yakni :

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel akuntabilitas (X1) kepada kualitas LKPD (Y) yakni sejumlah = $0,006 < 0,05$. Serta nilainya t hitung sejumlah = $2.783 > t$ tabel 1.658. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh secara

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang pada taraf signifikansi 5%.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel transparansi (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar $= 0,148 > 0,05$. Dan nilai t hitung sebesar $= -1,456 < t$ tabel 1,658. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti bahwa secara parsial variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang pada taraf signifikansi 5%.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel sistem pengendalian intern (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar $= 0,000 < 0,05$. Dan nilai t hitung sebesar $= 5,390 > t$ tabel 1,658. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti bahwa secara parsial variabel sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang dengan signifikansi 5%.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Diketahui nilai sig untuk pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia (X4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar $= 0,000 < 0,05$. Dan nilai t hitung sebesar $= 4,479 > t$ tabel 1,658. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa H4 diterima, yang berarti bahwa secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang dengan signifikansi 5%.

4.6.3 Hasil Uji F

Menguji F dilaksanakan guna mengamati apakah variabel independen (X) yakni : Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) memberi pengaruhnya kepada Variabel dependen (Y) yakni : Kualitas LKPD, Kriteria penerimaan ataupun penolakan hipotesis dilaksanakan mempergunakan kriterianya yaitu:

- a. Manakala nilainya sig. < 0,05 berarti variabel independen (X) dengan bersamaan ada pengaruhnya kepada variabel dependen (Y).
- b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen (X) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y)

Tabel 4.17

Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	284.847	4	71.212	66.941	0,000 ^b

Residual	123.401	116	1.064		
Total	408.248	120			

Sumber: Data Spss yang diolah, 2022

Variabel independen secara garis besar berpengaruh positif terhadap variabel dependen (Y): Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Berdasarkan pada tabel nilai F hitung 66.941 lebih besar dari nilai F tabel 2,46 dan signifikan 0,000 maka hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti semua variabel independen (akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota semarang) pada taraf signifikan 5%.

4.6.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui presentase seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah) dapat menggunakan pengujian koefisien determinasi R^2 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.18

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,835 ^a	0,698	0,687	1.031

Sumber : Data SPSS yang di olah, 2022

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.18 menunjukkan besarnya R^2 adalah 0,687 atau 68,7%. Dengan demikian pengaruh variabel independen (akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang) adalah sebesar 68,7%. Sedangkan sisanya adalah 31,3 adalah dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

4.7 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Secara Stimultan Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara stimultan terdapat pengaruh positif variabel independen : Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Sistem Pengendalian

Intern (X3), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) terhadap variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) di Kota Semarang. Pengaruh positif tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Diperoleh nilai F hitung 66.941 lebih besar dari nilai F tabel 2,46 jadi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar variabel independen yang telah diuji berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.

4.7.2 Pengaruh Penerapan Akuntabilitas secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel Akuntabilitas (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,219 artinya jika pemahaman Akuntabilitas meningkat sebesar 1% dan variabel lain nilainya tetap maka Akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 0,219 Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Akuntabilitas maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang semakin tinggi.

Pada tabel uji t juga diketahui bahwa variabel akuntabilitas memiliki t hitung > t table yaitu $2.783 > 1.658$ dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,006 < \alpha 0,05$. Nilai rata-rata (mean) variabel Akuntabilitas adalah 17,61 lebih besar dari nilai median sebesar 17,00 Berdasarkan tanggapan responden akuntabilitas terendah terletak pada indikator “mampu mempertanggungjawabkan terhadap dampak yang

ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan” dengan skor 323,5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa lembaga birokrasi pemerintahan kota Semarang sudah sepenuhnya melakukan Akuntabilitas dengan baik. Sehingga penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sudah memenuhi syarat yang relevan dan andal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa Penerapan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Simanjorang, 2018) dan (Idward, 2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil statistik menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ini berarti bahwa peran akuntabilitas di organisasi sektor pemerintahan sudah menerapkan dengan maksimal.

4.7.3 Pengaruh Transparansi Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel transparansi (X2) memiliki koefisien regresi sebesar -0,105 artinya

jika transparansi meningkat sebesar 1% dan variabel lain nilainya tetap, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan sebesar -0,105. Koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa faktor transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa di dalam organisasi sektor pemerintahan belum menerapkan faktor transparansi dengan baik.

Pada tabel uji t juga dapat diketahui bahwa variabel transparansi (X₂) memiliki t hitung > t table -1456 < 1.658 arah negatif dan nilai signifikansi 0,148 > α (0,05). Nilai rata-rata (mean) sebesar 16,67 lebih besar dari nilai median sebesar 16,00 sehingga kualitas data yang diperoleh untuk variabel transparansi belum memenuhi syarat yang relevan dan andal. Hal ini disebabkan karena organisasi sektor pemerintahan Kota Semarang belum menerapkan transparansi dengan baik dalam membuat laporan Keuangan pemerintah daerah. Sehingga penyajian laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan masih ada data dan fakta yang tidak relevan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H₂ yang menyatakan transparansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang **ditolak**. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi (X₂) tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Riyanti, 2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Simanjorang, 2018) dengan hasil transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.7.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,416 artinya jika Sistem Pengendalian Intern meningkat sebesar 1% dan variabel lainnya tetap maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan 0,416. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Sistem Pengendalian Intern maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga akan semakin tinggi.

Pada tabel uji t juga dapat diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki t hitung $>$ t table yaitu $5.390 > 1.658$ arah positif dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha (0,05)$. Nilai rata-rata (mean) variabel Sistem Pengendalian Internal 17,46 lebih besar dari nilai median sebesar 16,00 sehingga kualitas data yang diperoleh untuk variabel Sistem Pengendalian Intern cukup baik atau memiliki penyebaran data yang merata karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar

deviasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sudah dilakukan secara lengkap dan menyeluruh terhadap sistem akuntansi mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern secara lengkap dan menyeluruh sepenuhnya mengurangi pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (X3) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum, 2018), (Kiranayanti & Erawati, 2016) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Riyanti, 2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.7.5 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang

Berdasarkan hasil hipotesis secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa koefisien regresi penerapan Kompetensi SDM sebesar 0,343, artinya jika Kompetensi SDM meningkat sebesar 1% dan variabel lainnya tetap maka Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,343. Koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi Kompetensi SDM maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga akan semakin tinggi.

Pada tabel uji t dapat diketahui bahwa variabel Kompetensi SDM (X4) memiliki t hitung $< t$ tabel yaitu $4.479 > 1.658$ arah positif dan nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ (0,05). Nilai rata-rata (mean) variabel Kompetensi SDM adalah 17,67 lebih besar dari nilai median sebesar 16,00. Nilai tersebut menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah Kota Semarang memiliki kompetensi sumber daya manusia yang sudah memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_4 yang menyatakan Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Semarang **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM (X4) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018), (Lestari & Hastuti, 2020), (Ramadhani et al., 2019), (Kiranayanti & Erawati, 2016) dan (Idward, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Ningrum, 2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini dapat dijelaskan, bahwa penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang cermat, akurat dan andal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Parsial Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.
2. Transparansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.
3. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.
5. Secara Stimultan Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

5.2 Implikasi

1. Implikasi teoritis

Harapan dilakukan penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh dari teori keagenan dengan faktor akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya berkaitan dengan pemerintah daerah, teori keagenan merupakan suatu konsep yang menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan yang akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan masyarakat. Meskipun dari empat variabel tersebut tidak semuanya terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, setidaknya terdapat tiga variabel yang berpengaruh positif yaitu akuntabilitas, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan, untuk variabel transparansi tidak terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Implikasi Praktis

Harapan dilakukan penelitian ini yaitu terdapat implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dapat ditinjau melalui beberapa faktor penentu yaitu tingkat akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Sehingga melalui penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat dalam tingkat akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang.
2. Penelitian ini hanya mencakup empat variabel independen yang digunakan untuk menentukan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu: akuntabilitas, transparansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun masih banyak variabel independen yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Dengan melihat kekurangan pada penelitian ini, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang serupa di masa akan datang untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Berikut ini saran dari peneliti:

1. Bagi pemerintah Kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan informasi yang andal, relevan dan terpercaya untuk menyajikan informasi laporan keuangan secara terbuka (transparan) kepada publik agar publik dapat mempercayai kualitas kinerja pemerintah daerah kota Semarang dengan baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan bagi peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah yang lebih luas dan di berbagai bidang dan tidak hanya di kota Semarang.
3. Hasil penelitian ini juga masih memiliki variabel independen lain yang berpengaruh dalam penelitian ini. Untuk studi selanjutnya, hasil penelitian ini harus digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih optimal dan menambahkan variabel lain.

5.5 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini dapat diajukan dua saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan akuntabilitas (menjadi pemerintah yang akuntabel) , transparansi (terbuka untuk umum dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern yang memadai, dan sumberdaya manusia yang berkompeten. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang benar.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, pengetahuan dan dijadikan bahan referensi yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R., & Hoesada, J. (2020). The effect of government accounting standards, internal control systems, competence of human resources, and use of information technology on quality of financial statements. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS)*, 7(1), 4–10.
- Idward, N. N. (2017). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI PEMODERASI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)*. 1–23.
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1290–1318.
- Lestari, S. F., & Hastuti. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 71, 1–

8.

Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Universitas Islam Indonesia*.

Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Binangkit, I. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 250–260.

Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2019). PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PEMAHAMAN BASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1). <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5244>

Riyanti, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–13.

Septiana, L. (2016). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN*

*PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Sawahlunto). 1–26. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00563>*

Simanjorang, C. N. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat). *Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unpas Bandung*, 53(9), 1689–1699.

